

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- . 2009. *Pemahaman Awal, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Vol. 1. Kencana. Jakarta.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Assa Endshaw. 2007. *Hukum E-commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*. terjemahan Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Bachruddin. 2021. *Hukum Kenotariatan. Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*. Cet. 1. Thema Publishing. Yogyakarta.
- Budhijanto. 2014. *Teori Hukum Konvergensi*. Refika Aditama. Bandung.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Eddy Army. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Cet. I. Sinar Grafika. Jakarta.
- Edmon Makarim. 2020. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Ed. 3. Cet. 4. Rajawali Pers. Depok.
- Ghansam Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Habib Adjie (I). 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- . 2008. *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- , 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama. Bandung.
- , 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama. Bandung.
- , 2015. *Majelis Pengawas Notaris, Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Refika Aditama. Bandung.
- , 2020. *Problematika dan Solusi Terpilih Tentang Hukum Kenotariatan Indonesia*. Cet. 1. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , dan Rusdianto Sesung. 2020. *Tafsir. Penjelasan. Dan Komentor Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Refika Aditama. Bandung.
- Hadin Muhjad, H.M. 2018. *Eksistensi Notaris Dalam Dinamika Hukum dan Kebijaksanaan*. Cet. I. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum. Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Cet. 1. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Kohar, A. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.
- Ivo Dewi Kumalawati, dkk. 2021. *Hukum Kenotariatan. Karakteristik Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara*. Cet. I. September. Laksbang Pustaka. Yogyakarta.
- Jehani Libertus. 2007. *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian. Dilengkapi Contoh-Contoh : Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Pinjam Pakai, Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian Kerja, Perjanjian Franchise, Surat Kuasa*. Visimedia. Jakarta.
- Lumban Tobing. 1999. G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta.
- Maskun dkk. 2020. *Korelasi Kejahatan Siber & Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*. Cet. I. Nas Media Pustaka. Makassar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Pengurus Pusat Notaris Ikatan Notaris Indonesia. 2015. *Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia*. Banten.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- , 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. cet. 13. Kencana. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Philippe Nonet & Philip Selznick. 2003. *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*. Cet. I. Huma. Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1980. *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Shidqi, N. 2020. *Hukum Pengawas Notaris di Indonesia dan Belanda*. Penerbit Kencana. Jakarta.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 2004. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sugiarto, Agus & Wahyono, T. 2014. *Manajemen Kearsipan Elektronik*. Gava Media Yogyakarta.
- R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)*. Rafika Aditama. Bandung.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press. Jakarta.
- Salim, HS. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. I. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Cet. 1. Mandar Maju. Bandung.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Suparlan Suhartono. 2008. *Filsafat Ilmu pengetahuan; Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan*. Cet. 1. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soetiksno. 2004. *Filsafat Hukum bagian 1*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Tan Thong Kie. 2010. *Studi Notariat*. PT. Midas Surya Grafindo. Jakarta.
- Tan Thong Kie. 2013. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2014. *Filsafat, teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pusaka. Jakarta.
- Widodo Dwi Putro 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta.

## **Jurnal**

- Desy Rositawati, I Made Arya Utama and Desak Putu Dewi Kasih. 2017. *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary*. Jurnal ilmiah. Acta Comitatus.
- Fitriyeni, C. E. 2012. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. 2019. *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum*. *Crepido*.
- Kuswanto, M. R., & Purwadi, H. (2017). *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*. *Jurnal Repertorium*.

- Lana Imtiyaz, Budi Santoso & Adya Paramita Prabandari. 2020. *Reaktualisasi Undang-undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris*. Jurnal Notarius. No. 1 Vol. 13
- Maradesa, K. R. 2014. *Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. Lex Privatum.
- Maskun. 2021. Perkembangan Hukum Telematika. "Prospek dan Tantangan." *Prosiding Konferensi Nasional Perbandingan Hukum Indonesia* 1.
- Mohamat Rizi Kuswanto. 2017. *Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Kepastian Hukumnya Di Indonesia*. Vol. 6 Jurnal Repertorium.
- Naily Zahrotun Nisa. 2020. *Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik*. Jurnal Civic Hukum. Volume 5. Nomor 2.
- P.Balbudhe. 2013. *Cloud Storage Reference Model for Cloud Computing*. Vol. 2 International Journal of IT Engineering and Applied Sciences Research.
- Rahman, Y. P. 2019. *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum).
- Tony Prayogo, R. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang". Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13. Nomor 2. 194.
- Zulkifli Amsyah. 2005. *Manajemen Kearsipan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

### **Tesis**

- Amelia, S. 2019. *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli di Kabupaten Tegal*. Universitas Sultan Agung Semarang.

Indra Pranajaya. 2012. *Studi Komparatif Terhadap Jabatan dan Kode Etik Notaris di Indonesia dan Jepang*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta

### **Disertasi**

Andre Farrugia. *The Office of Notary Public in an ever-evolving electronic world*. Malta.

Hadi Hadi. *The Role of Public Notaries and formal documentation in reducing transaction costs*. Alborz campus University of Tehran.

Leslie G. Smith. 2006. *The Role of The Notary in Secure electronic commerce*. Faculty of Information Technology Queensland University of Technology.

Unggul Basoeki. *Juridical Analysis of the authenticity of notary deed after apostille is implemented in Indonesia*. Universitas Diponegoro Indonesia.

### **Online**

Setyawan, kabarnotariat.id, 2018, 6 Desember 2018 “Mau Jadi Notaris Mudah Kok?” (Online) <https://kabarnotariat.id/2018/12/06/mau-jadi-notaris-mudah-kok>. (diakses 25 September 2022).

Indra, Jakarta.kemenkumham.go.id, 25 Februari 2022, *Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas dan Alat Bukti Yang Sah (Sosialisasi Pengelolaan Arsip Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta)*, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/arsip-sebagai-bahan-akuntabilitas-dan-alat-bukti-yang-sah-sosialisasi-pengelolaan-arsip-kanwil-kemenkumham-dki-jakarta>, (diakses pada tanggal 15 Agustus 2023).

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik>.

Korean Notaries Association, <[http://www.koreanotary.or.kr/wp-content/uploads/2015/09/KNA-presentation\\_2015.pdf](http://www.koreanotary.or.kr/wp-content/uploads/2015/09/KNA-presentation_2015.pdf)>, hlm. 13, diakses 10 Maret 2024.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Tentang Jabatan Notaris.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang *Kearsipan*

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 *tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang *Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.10.Tahun 2007, *tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 *tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2012 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.*

## **Kamus**

Kansil, Cst. et.al. 2009. *Kamus Istilah Hukum.* Jakarta.

Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Marjane Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda – Indonesia*, Djambatan, Jakarta.